

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Penelitian ini didasarkan pada *stewardship theory* dimana manajemen sebagai pihak yang dipercaya untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk kepentingan umum atau publik dan para pemangku kepentingan. *Stewardship theory* ini didasarkan pada perilaku dan pola manusia serta mekanisme psikologis berupa motivasi, identifikasi, dan kekuasaan pada suatu organisasi. Pada *stewardship theory*, manajemen bertindak sesuai kepentingan bersama, apabila kepentingan manajemen dan agen tidak sejalan maka manajemen akan menjalin kerjasama. Hal ini dikarenakan manajemen merasa semua adalah kepentingan bersama dan bertindak sesuai perilaku agen, serta mempertimbangkan upaya untuk mencapai tujuan organisasi (Puyvelde, *et al.*, 2016).

(Donaldson & Davis, 1991) dalam (Rezkiyanti, 2019) menganjurkan *stewardship theory* dimana manajer tidak didasarkan pada tujuan atau kepentingan individu dalam melaksanakan tugasnya, tetapi mengutamakan kepentingan bersama, lain halnya dengan *agency theory* yang berkonsentrasi hanya pada hubungannya saja, memiliki sifat hubungan formal dan kontraktual namun dengan ketidakpedulian tujuan yang dianggap tidak memiliki kepentingan yang sama. *Stewardship theory* dilandasi oleh tindakan atau perilaku yang selalu dapat diajak bekerja sama dalam suatu organisasi sehingga selalu dapat berpartisipasi dalam pelayanan. Layanan yang diberikan akan membawa kepuasan dan kesuksesan bagi organisasi.

Stewardship theory mengasumsikan adanya korelasi atau hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principal dan manajemen. Kesuksesan organisasi ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Jefri, 2018). Seiring perkembangan akuntansi sektor publik, teori ini dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi steward (pengelola) dan principal (pemilik) yang akan membangun suatu hubungan atas dasar kepercayaan agar sejalan dengan tujuan organisasi yang telah disepakati.

(Indrayani & Widiastuti, 2020) menjelaskan bahwa *stewardship theory* sejalan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, pemerintah sebagai *steward* yang mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik, pemerintah sebagai *steward* memiliki tugas melayani publik dan mensejahterakan masyarakat. Implikasi *stewardship theory* pada penelitian ini dapat dikaitkan dengan pengelolaan dana daerah dimana pemerintah daerah dipercaya untuk mengelola dana daerah dengan meningkatkan transparansi dan kinerja sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.

2.1.2 Akutansi Sektor Publik

Menurut Meliana dalam (Hartoto *et al*, 2023:2) akuntansi sektor publik merupakan gabungan kata akuntansi dengan sektor publik. Akuntansi merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penganalisisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan bagi entitas untuk pengambilan keputusan

sedangkan sector public merupakan entitas yang dikelola dan dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pembiayaan public. Selanjutnya menurut (Handayani 2019:1) akuntansi sektor publik adalah sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga public sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut (Hartoto, 2023: 32) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut.

1. Manajemen kontrol yaitu sebagai pengendali manajemen dan akuntansi sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien serta memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik.
2. Akuntabilitas yaitu memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik, *accountability* digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atau sumber daya atau bidang atau divisi yang berada dalam wewenang manajer tersebut.

Menurut (Hartoto, 2023: 34) akuntansi pemerintah menggunakan data akuntansi sebagai informasi dalam penerapannya dan akuntansi ini berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang akan diberikan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Pada jenis ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah; akuntansi provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dalam (Oktaviani & Sari, 2020) Sistem Pengendalian Internal didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal merupakan rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva serta menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aseorganisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Shintadevi, 2015).

Tujuan utama pengendalian adalah memastikan entitas dalam hal ini pemerintah daerah melaksanakan kegiatan secara tertib, efisien, dan sesuai prosedur sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas publik, dan kesalahan dapat dideteksi untuk segera diatasi (Nogueira & Jorge, 2017). Fungsi Sistem Pengendalian Internal sendiri adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, SDM, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan pengembangan teknologi serta

dilakukan secara komprehensif (Santoso, 2016). Pengendalian internal dapat dicapai apabila suatu organisasi dalam hal ini pemerintah daerah menggunakan komponen pembentuk Sistem Pengendalian Intern pada setiap aktivitas operasi.

2.1.4 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 3 ayat (1) dalam (Shintadevi, 2015) disebutkan Sistem Pengendalian Intern terdiri dari beberapa unsur utama, meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari:

- a. Identifikasi risiko.
- b. Analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah dilaksanakan selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian meliputi:

- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan SDM.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pemisahan fungsi.
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Mardiasmo, 2018:27) akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas juga menjadi syarat dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan supaya kekuasaan digunakan sebagaimana mestinya.

(Afriansyah *et al*, 2022) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penerapan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan ini dicatat dalam administrasi keuangan desa meliputi buku APBD desa, buku rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank desa. Perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dimana melibatkan masyarakat dan pengguna informasi lainnya. Azas-azas

pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran harus diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa maka informasi yang diakses adalah informasi yang andal dan dapat dipercaya sehingga tidak menyesatkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal ini penting mengingat informasi ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

2.1.6 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Ihyaul Ulum, 2010:41) dalam (Puspitawati & Effendi, 2021) salah satu jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan harus ditopang oleh tiga komponen utama yaitu pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuanganpun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- 3) Undang-Undang APBN,
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.1.7 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal yang baik memastikan bahwa setiap pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan peraturan, prosedur, dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan *stewardship theory*, pemerintah desa diharapkan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat, pemerintah desa perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Tanpa terjadinya penyelewengan dan penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai, sehingga sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Antika *et al*, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Khoirina & Widaryanti, 2023) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini didukung oleh penelitian oleh (Afriansyah *et al*, 2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Arza, 2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ana Khoirina dan Widaryanti	Judul: Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Jurnal: Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Volume. 02, No. 02, Agustus 2023	Dependen: Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Independen: 1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan 3. Sistem Pengendalian Internal Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Hasil Penelitian: 1. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas	Sama-sama meneliti Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Adanya penambahan variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>dalam pengelolaan keuangan desa</p> <p>2. Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa</p> <p>3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa</p>		
2	Berlian Afriansyah, Meriana dan Paddery	<p>Judul: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong)</p> <p>Jurnal: <i>Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo</i></p> <p>Volume. 8, No. 2, 2022</p>	<p>Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Independen:</p> <p>1. Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>2. Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan</p> <p>3. Sistem Pengendalian Internal</p>	Sama-sama meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Perbedaannya terletak pada perusahaan yang diteliti, adanya penambahan variabel yaitu kompetensi aparatur pengelolaan keuangan

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>Alat Analisis: Analisis linear berganda</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 2. Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 3. Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 		
3	Siti Hasanah, Enung Nurhayati dan Dendi Purnama	Judul: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Sama-sama meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Ada penamabahan variabel independen yang diteliti yaitu kompetensi aparatur pengelola keuangan

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Kuningan). Jurnal: Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia Volume.4, No 1, 2020	Independen: 1. Kualitas Laporan Keuangan 2. Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan 3. Sistem Pengendalian Internal Alat Analisis: Analisis regresi linear berganda Hasil Penelitian: 1. Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 2. Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			3. Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
4	Amanda Mutiara Sweetenia, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia, dan Anissa Hakim Purwantini	Judul: Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Jurnal: <i>Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi</i> Volume 17, No. 01, 2019	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Independen: 1. Kompetensi aparatur desa 2. Sistem pengendalian internal 3. Kualitas penyajian laporan keuangan Alat Analisis: Analisis regresi linear berganda	Sama-sama meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Perbedaannya terletak pada perusahaan yang diteliti, adanya penambahan variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa dan kualitas penyajian laporan keuangan

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 2. Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 3. Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 		

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dituliskan di atas, maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen dalam hal ini adalah Sistem Pengendalian Internal (X) terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis

terhadap rumusan masalah penelitian, belum sebagai jawaban yang empiris (Hardani *et al*, 2020:329). Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di kantor Desa Tanjung Dalam.